

TINGKAT PENDIDIKAN DAN KESENJANGAN KONSUMSI RUMAH TANGGA ANTARWILAYAH DI SULAWESI SELATAN

Nurliana^{1*}), Maghfirah Sari Azis²⁾

¹Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar

²Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar

Email: nurliana@unm.ac.id, maghfirahazis@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendidikan berdasarkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan kaitannya dengan kesenjangan konsumsi rumah tangga antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu data RLS tahun 2025 dan data pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan Susenas Maret 2024. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan capaian RLS dan proporsi pengeluaran makanan serta bukan makanan pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RLS Sulawesi Selatan tahun 2025 sebesar 9,00 tahun. Wilayah kota memiliki rata-rata RLS lebih tinggi, yaitu 11,22 tahun, dibandingkan wilayah kabupaten sebesar 8,38 tahun. Kota Makassar mencatat RLS tertinggi sebesar 11,59 tahun, sedangkan Kabupaten Jeneponto terendah sebesar 7,02 tahun. Dari sisi konsumsi rumah tangga, persentase konsumsi makanan Sulawesi Selatan sebesar 49,62% dan konsumsi bukan makanan sebesar 50,38%. Kota Parepare memiliki proporsi konsumsi makanan terendah sebesar 40,45%, sedangkan Kabupaten Jeneponto tertinggi sebesar 57,91%. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi bahwa wilayah dengan RLS lebih tinggi cenderung memiliki proporsi konsumsi makanan lebih rendah dan konsumsi bukan makanan lebih tinggi. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendapatan, dan kesejahteraan rumah tangga. Namun, penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Kata Kunci: Rata-rata Lama Sekolah, konsumsi rumah tangga, Sulawesi Selatan

ABSTRACT

This research investigates educational achievement via the Average Years of Schooling indicator and its link to household consumption disparities across regions in South Sulawesi Province. Adopting a descriptive quantitative design it relies on secondary data from Statistics Indonesia including 2025 AYS figures and March 2024 National Socio-Economic Survey consumption expenditure data from the descriptive-comparative analysis by comparing AYS achievements and the proportion of food and non-food spending share among the province's regencies and cities. South Sulawesi in 2025 was 9.00 years. Urban regions showed a higher average AYS of 11.22 years, than regency areas which averaged 8.38 years. Makassar City achieved the highest AYS at 11.59 years, whereas Jeneponto Regency recorded the lowest at 7.02 years. For household consumption, South Sulawesi food expenditure comprised 49.62%, while non-food expenditure of 50.38%. Parepare City had the lowest food consumption proportion at 40.45%, while Jeneponto Regency had the highest at 57.91%. The results suggest that areas with elevated AYS are linked to reduced food consumption shares and increased non-food shares. Hence, education plays an important role in improving human resource quality, income, and household welfare. However, this study is descriptive in nature and does not establish a direct causal relationship.

Keywords: Average Years of Schooling, Household Consumption, South Sulawesi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas hidup masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, pengurangan ketimpangan, serta pencapaian kesejahteraan sosial yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, keberhasilan suatu wilayah tidak cukup hanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga melalui sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, pendapatan, maupun pola konsumsi rumah tangga (Amin, et al., 2025).

Salah satu faktor yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Zulkarnaenl, Septiantoko, Bandhu, & Herawaty, 2025). Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak, pendapatan yang lebih baik, serta kualitas hidup yang lebih tinggi. Manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi (Adriani, 2024).

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Average Years of Schooling (AYS) merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai capaian pendidikan suatu wilayah. RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh penduduk dalam pendidikan formal. Indikator ini menjadi penting karena dapat mencerminkan tingkat partisipasi dan keberlanjutan pendidikan masyarakat. Selain itu, RLS juga memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek pembangunan, seperti produktivitas ekonomi, tingkat kemiskinan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Nasri dalam Zulkarnaenl, Septiantoko, Bandhu, dan Herawaty (2025) menjelaskan bahwa RLS tidak hanya mencerminkan capaian pendidikan formal, tetapi juga berkorelasi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain pendidikan, pola konsumsi rumah tangga juga menjadi indikator penting dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Struktur pengeluaran rumah tangga, khususnya proporsi pengeluaran untuk makanan dan nonmakanan, dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu rumah tangga. Berdasarkan Hukum Engel, semakin rendah tingkat pendapatan suatu rumah tangga, maka semakin besar proporsi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan karena sebagian pendapatan dapat dialokasikan untuk kebutuhan nonmakanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan rekreasi. Dengan demikian, semakin besar persentase pengeluaran untuk makanan, maka hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga relatif lebih rendah (Nurliana, Azis, & Paramita, 2025).

Berdasarkan data BPS Susenas Maret 2024, pola konsumsi rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Penduduk perkotaan membelanjakan 46,07% pengeluarannya untuk makanan, sedangkan penduduk perdesaan mencapai 54,27%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penduduk perdesaan masih mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan. Berdasarkan prinsip Hukum Engel, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan relatif lebih baik dibandingkan penduduk perdesaan. Hal ini dapat terjadi karena wilayah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, lapangan kerja, fasilitas ekonomi, dan layanan publik dibandingkan wilayah perdesaan. Sejalan dengan kondisi kesejahteraan tersebut, capaian pendidikan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah. Berdasarkan data RLS tahun 2025, capaian pendidikan di Sulawesi Selatan masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah. RLS Sulawesi Selatan sebesar 9,00 tahun, sementara rata-rata RLS wilayah kota, yaitu Makassar, Parepare, dan

Palopo, mencapai 11,22 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata RLS kabupaten sebesar 8,38 tahun. Selisih 2,83 tahun ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di wilayah kota relatif lebih baik dibandingkan kabupaten.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, terdapat variasi proporsi pengeluaran makanan antarwilayah di Sulawesi Selatan. Penduduk perkotaan di Kota Pare-Pare membelanjakan sebagian kecil pengeluarannya untuk kebutuhan makanan, yaitu sebesar 40,31%, disusul oleh Kabupaten Wajo sebesar 43,79% dan Kota Makassar sebesar 43,89%. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat pada tiga wilayah tersebut relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, Kabupaten Bantaeng memiliki persentase pengeluaran makanan yang paling besar, yaitu 54,60%. Tingginya proporsi pengeluaran makanan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga ruang untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan cenderung lebih terbatas.

Sejalan dengan kondisi kesejahteraan tersebut, capaian pendidikan di Sulawesi Selatan juga masih menunjukkan kesenjangan antarwilayah. Berdasarkan data RLS tahun 2025, Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 9,00 tahun. Sementara itu, rata-rata RLS wilayah kota, yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo, mencapai 11,22 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata RLS wilayah kabupaten yang hanya sebesar 8,38 tahun. Selisih sebesar 2,83 tahun antara wilayah kota dan kabupaten menunjukkan bahwa capaian pendidikan di wilayah kota relatif lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa akses, fasilitas, dan keberlanjutan pendidikan di wilayah perkotaan cenderung lebih memadai.

Kesenjangan pendidikan antarwilayah semakin terlihat apabila dibandingkan antara daerah dengan RLS tertinggi dan terendah. Kota Makassar mencatat RLS tertinggi sebesar 11,59 tahun, sedangkan Kabupaten Jeneponto mencatat RLS terendah sebesar 7,02 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan di Sulawesi Selatan. Wilayah dengan RLS yang lebih tinggi umumnya memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, serta pendapatan masyarakat. Sebaliknya, wilayah dengan RLS yang rendah berpotensi menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Keterkaitan antara pendidikan dan pola konsumsi rumah tangga menjadi penting untuk dianalisis karena keduanya merupakan indikator yang saling berhubungan dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, terutama dalam mengurangi proporsi pengeluaran untuk makanan dan meningkatkan pengeluaran untuk kebutuhan nonmakanan. Dengan kata lain, wilayah dengan capaian pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik, sedangkan wilayah dengan capaian pendidikan rendah berpotensi memiliki proporsi pengeluaran makanan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kesenjangan pendidikan dan kesenjangan konsumsi rumah tangga merupakan dua persoalan penting dalam pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Perbedaan Rata-Rata Lama Sekolah antarwilayah dapat mencerminkan ketimpangan kualitas sumber daya manusia, sedangkan perbedaan proporsi pengeluaran makanan dapat mencerminkan ketimpangan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana tingkat pendidikan, yang diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah, berkaitan dengan kesenjangan konsumsi rumah tangga antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pendidikan berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan kaitannya dengan kesenjangan konsumsi rumah tangga antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara capaian pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata, khususnya dalam bidang pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

METODOLOGY

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat pendidikan berdasarkan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta kaitannya dengan kesenjangan konsumsi rumah tangga antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perbedaan capaian pendidikan dan pola konsumsi masyarakat pada wilayah kabupaten dan kota.

Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan unit analisis seluruh kabupaten/kota yang terdapat di wilayah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025 dan data pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024. Data tersebut digunakan untuk melihat perbedaan tingkat pendidikan dan proporsi pengeluaran makanan antarwilayah di Sulawesi Selatan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel utama, yaitu tingkat pendidikan dan konsumsi rumah tangga. Tingkat pendidikan diukur menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk. Sementara itu, konsumsi rumah tangga diukur melalui persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan capaian RLS dan proporsi pengeluaran makanan di masing-masing kabupaten/kota. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan capaian pendidikan dan pola konsumsi antara wilayah kota dan kabupaten, serta antara wilayah dengan RLS tertinggi dan terendah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif berdasarkan Hukum Engel untuk melihat hubungan antara proporsi pengeluaran makanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data RLS dan data proporsi pengeluaran makanan dari BPS, mengelompokkan data berdasarkan kabupaten dan kota, menghitung rata-rata RLS wilayah kota dan kabupaten, membandingkan wilayah dengan capaian RLS tertinggi dan terendah, serta menginterpretasikan keterkaitan antara capaian pendidikan dan pola konsumsi rumah tangga. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan adanya kesenjangan pendidikan dan kesejahteraan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut menyajikan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2025 dan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2024 pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. RLS digunakan sebagai indikator tingkat pendidikan, sedangkan persentase konsumsi makanan dan bukan makanan digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan Hukum Engel.

Tabel 1. Rata-rata Lama Sekolah 2025 dan Susenas Maret 2024

No	Kabupaten/Kota	RLS 2025 (Tahun)	Konsumsi Makanan 2024 (%)	Konsumsi Bahan Makanan 2024 (%)
1	Kepulauan Selayar	8,64	54,47	45,53
2	Bulukumba	8,66	53,28	46,72
3	Bantaeng	7,43	55,86	44,14
4	Jeneponto	7,02	57,91	42,09
5	Takalar	7,84	50,24	49,76
6	Gowa	8,54	51,52	48,48
7	Sinjai	7,97	56,02	43,48
8	Maros	8,20	51,04	48,96
9	Pangkajene dan Kepulauan	8,48	49,96	50,04

10	Barru	8,93	53,03	46,97
11	Bone	7,70	47,85	52,15
12	Soppeng	8,59	49,79	50,21
13	Wajo	7,72	47,62	52,38
14	Sidenreng Rappang	8,36	50,90	49,10
15	Pinrang	8,54	53,53	46,47
16	Enrekang	9,26	52,82	47,18
17	Luwu	8,96	54,75	45,25
18	Tana Toraja	8,92	54,41	45,59
19	Luwu Utara	8,51	54,19	45,81
20	Luwu Timur	9,04	49,15	50,85
21	Toraja Utara	8,72	55,22	44,78
22	Makassar	10,89	40,45	59,55
23	Parepare	11,17	48,06	51,94
	Sulawesi Selatan	9,00	49,62	50,38

Sumber: BPS, Rata-rata Lama Sekolah 2025 dan Susenas Maret 2024

Berdasarkan tabel tersebut, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 sebesar 9,00 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Selatan telah menempuh pendidikan formal selama sekitar sembilan tahun atau setara dengan jenjang SMP/ sederajat. Namun, capaian RLS tersebut belum merata di seluruh kabupaten/kota karena masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara wilayah kota dan kabupaten. Wilayah dengan RLS tertinggi adalah Kota Makassar sebesar 11,59 tahun, diikuti oleh Kota Palopo sebesar 11,17 tahun, dan Kota Parepare sebesar 10,89 tahun. Ketiga wilayah tersebut merupakan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan di wilayah kota cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Tingginya RLS di wilayah kota dapat dipengaruhi oleh akses pendidikan yang lebih baik, ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif lebih mendukung keberlanjutan pendidikan.

Sementara itu, wilayah dengan RLS terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 7,02 tahun, disusul oleh Kabupaten Bantaeng sebesar 7,43 tahun, Kabupaten Bone sebesar 7,70 tahun, dan Kabupaten Wajo sebesar 7,72 tahun. Rendahnya RLS pada beberapa kabupaten tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pemerataan pendidikan di Sulawesi Selatan. Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan faktor ekonomi rumah tangga, akses terhadap sarana pendidikan, jarak sekolah, serta kemampuan masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dibandingkan antara wilayah kota dan kabupaten, rata-rata RLS wilayah kota, yaitu Makassar, Parepare, dan Palopo, mencapai 11,22 tahun, sedangkan rata-rata RLS wilayah kabupaten hanya sebesar 8,38 tahun. Selisih sebesar 2,84 tahun menunjukkan bahwa capaian pendidikan di wilayah kota relatif lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan pendidikan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki persentase konsumsi makanan sebesar 49,62% dan konsumsi bukan makanan sebesar 50,38%. Berdasarkan Hukum Engel, semakin besar proporsi pengeluaran untuk makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga cenderung lebih rendah. Sebaliknya, semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan dan semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga cenderung lebih baik. Berdasarkan tabel, wilayah dengan persentase konsumsi makanan terendah adalah Kota Parepare sebesar 40,45%, disusul oleh Kota Makassar sebesar 43,89%, dan Kabupaten Wajo sebesar 47,62%. Rendahnya proporsi konsumsi makanan menunjukkan bahwa rumah tangga di wilayah tersebut memiliki ruang pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan bukan makanan, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, wilayah tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan rumah tangga yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah dengan proporsi konsumsi makanan yang lebih tinggi.

Sebaliknya, wilayah dengan persentase konsumsi makanan tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 57,91%, disusul oleh Kabupaten Sinjai sebesar 56,02%, Kabupaten Bantaeng sebesar 55,86%, dan Kabupaten Toraja Utara sebesar 55,22%. Tingginya proporsi konsumsi makanan menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan

rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan bukan makanan masih relatif terbatas.

Jika dikaitkan antara RLS dan pengeluaran konsumsi rumah tangga, terlihat bahwa beberapa wilayah dengan RLS tinggi cenderung memiliki proporsi konsumsi makanan yang lebih rendah. Misalnya, Kota Makassar memiliki RLS tertinggi sebesar 11,59 tahun dengan konsumsi makanan sebesar 43,89%, sedangkan Kota Parepare memiliki RLS sebesar 10,89 tahun dengan konsumsi makanan paling rendah, yaitu 40,45%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah dengan capaian pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sebaliknya, Kabupaten Jeneponto memiliki RLS terendah sebesar 7,02 tahun dan konsumsi makanan tertinggi sebesar 57,91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian pendidikan dapat berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pendidikan yang rendah dapat membatasi kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Akibatnya, sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Namun demikian, tidak semua wilayah menunjukkan pola yang sama secara mutlak. Misalnya, Kabupaten Wajo memiliki RLS yang relatif rendah, yaitu 7,72 tahun, tetapi persentase konsumsi makanannya juga cukup rendah, yaitu 47,62%. Hal ini menunjukkan bahwa selain pendidikan, terdapat faktor lain yang juga dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, seperti struktur ekonomi daerah, sumber pendapatan masyarakat, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan karakteristik sosial ekonomi wilayah.

Secara umum, hasil pembahasan menunjukkan adanya indikasi keterkaitan antara tingkat pendidikan dan pola konsumsi rumah tangga antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang lebih tinggi cenderung memiliki proporsi konsumsi makanan yang lebih rendah dan konsumsi bukan makanan yang lebih tinggi. Sebaliknya, wilayah dengan RLS rendah cenderung memiliki proporsi konsumsi makanan yang lebih besar (Ammar, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Kondisi tersebut dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al dalam (Hermawan & Bahjatulloh, 2022) yang menyatakan bahwa pendidikan memungkinkan kita untuk meningkatkan kualitas bakat dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung proses dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Pendidikan dapat digunakan untuk mencapai kegiatan pembangunan dan berpotensi meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang.

Dengan demikian, kesenjangan pendidikan antarwilayah di Sulawesi Selatan berpotensi berkaitan dengan kesenjangan konsumsi rumah tangga. Rendahnya pendidikan dikarenakan banyak anak yang berhenti bersekolah akibat permasalahan ekonomi dan masyarakatnya yang melumrahkan pernikahan dini juga merupakan hal yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan (Shalsadilla et al, 2023). Pemerataan akses pendidikan, terutama pada wilayah kabupaten dengan RLS rendah, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan fasilitas sekolah, pemberian bantuan pendidikan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Namun, karena analisis ini bersifat deskriptif, hubungan antara RLS dan konsumsi rumah tangga tidak dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E. (2024). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur) . J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains).
- Amin, D., Latuconsina, N., Hamizar, A., Malawat, F. F., Tomia, R., & Hanike, Y. (2025). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Widina Media Utama.
- Ammar, Z. (2024). Exploring the Relationship Between Education Levels and Non-Food Consumption in Indonesia . Journal of Economics, Management, Accounting and Computer Applications.
- Hermawan, A. A., & Bahjatulloh, Q. M. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat

sebagai Variabel Moderasi di Indonesia Tahun 2016-2020 . *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.

Nurliana, Azis, M. S., & Paramita, S. (2025). Ketimpangan Ekonomi dan Perbedaan Konsumsi Rumah Tangga: Studi Kasus Kota vs Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal Economy and Management* .

Shalsadilla, N. (2023). Penentuan Jumlah Cluster Optimum Menggunakan Davies Bouldin Index dalam Pengelompokan Wilayah Kemiskinan di Indonesia . *Statistika*.

Zulkarnaenl, M., Septiantoko, R., Bandhu, S., & Herawaty, H. (2025). Dinamika Kesenjangan Pendidikan di Sulawesi Selatan 2019 - 2024.